



# RENCANA AKSI KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023



NOMOR : LAP- /PW08/1/2023  
TANGGAL : FEBRUARI 2023



**RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2023**  
**PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG**

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2023	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)	ANGGARAN	PIC	SATUAN	TW1	TW2	TW3	TW4	Jumlah
					TW1	TW2	TW3	TW4											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13.00	14	15	16	17	18	19	20
<b>BIDANG IPP</b>																			
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Rupiah (Juta)	67,310.50		67,310.50			1	Pengawasan atas Permintaan K/L dan/atau Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan	Tim audit gagal dalam mendapatkan bukti (cukup, kompeten dan relevan) dan menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara	32,000,000.00	Rustam	PP	-	2	-	-	2
2		Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah	Rupiah (Juta)	184.00		184.00			1	Audit atas Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri	Tim audit gagal dalam mendapatkan bukti (cukup, kompeten dan relevan) dan menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara	28,280,000.00	Rustam	PP	-	1	-	1	2
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target	Proyek Strategis Nasional (PSN)	2.00				2.00	1	Pengawasan Proyek Strategis Nasional (Triwulan)	Laporan hasil pengawasan (kegiatan assurance) tidak didukung kertas kerja yang lengkap dan valid	28,280,000.00	Rustam	PP	1	1	1	1	4
4	Meningkatnya Kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP	Persentase rekomendasi strategis yang ditindak lanjuti	(%) Persen	80.00				80.00	1	Akuntabilitas penanganan Covid-19	Hasil Kegiatan Assurance (Audit, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan) tidak dapat ditindaklanjuti	28,280,000.00	Rustam	PP	-	-	2	-	2
<b>BIDANG APD</b>																			
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi	Rupiah (Juta)	1,098.00		1,098.00			1	Pelaksanaan evaluasi dan monitoring optimalisasi PAD	1. Hasil pengawasan belum dapat digunakan sebagai alat mengambil keputusan/4 2. Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penugasan Assurance (Audit, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan)/4	182,124,000.00	Ahmad Baihaqi	PP	-	2	-	-	2
2		Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Rupiah (Juta)	67,310.50	67,310.50				1	Pelaksanaan evaluasi Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah	1. Luasnya ruang lingkup evaluasi/4 2. Keterbatasan waktu penyelesaian/4	182,124,000.00	Ahmad Baihaqi	PP	2	1	-	-	3
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi	Kegiatan Prioritas Daerah	1.00	1.00				1	Pelaksanaan evaluasi dan monitoring Pengawasan atas Program Peningkatan Daya Saing Komoditas Kopi	Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penugasan Assurance (Audit, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan) / 4	59,160,000.00	Ahmad Baihaqi	PP	2	-	-	-	2
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP >= Level 3	Provinsi	1.00				1.00	1	Evaluasi Maturitas SPIP/MRI - Pemerintah Daerah	1. Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penugasan Consulting (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi)/3 2. Hasil Kegiatan Consulting (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi) tidak dapat ditindaklanjuti/4	60,708,000.00	Ahmad Baihaqi	PP	-	-	-	1	1
6		Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP >= Level 3	Kabupaten/Kota	14.00				14.00	1	Evaluasi Maturitas SPIP/MRI - Pemerintah Daerah	1. Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penugasan Consulting (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi)/3 2. Hasil Kegiatan Consulting (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi) tidak dapat ditindaklanjuti/4	60,708,000.00	Ahmad Baihaqi	PP	-	-	-	7	7

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2023	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)	ANGGARAN	PIC	SATUAN	TW1	TW2	TW3	TW4	Jumlah
					TW1	TW2	TW3	TW4											
7		Jumlah Kab/Kota dengan MRI >= Level 3	Kabupat en/Kota	3.00				3.00	1	Evaluasi Maturitas SPIP/MRI - Pemerintah Daerah	1. Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penugasan Consulting (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi)/3 2. Hasil Kegiatan Consulting (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi) tidak dapat ditindaklanjuti/4	60,708,000.00	Ahmad Baihaqi	PP	-	-	-	3	3
8		Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Pemda	5.00	2.00	3.00			1	1. Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Daerah (SAKIP) 2. Peningkatan Kualitas Opini LKPD	1. Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penugasan Consulting (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi)/3 2. Hasil Kegiatan Consulting (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi) tidak dapat ditindaklanjuti/4	33,696,000.00	Ahmad Baihaqi	PP	4	1	-	-	5
9		Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Desa	25.00	7.00	6.00	6.00	6.00	1	Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Desa	1. SDM yang ada belum memenuhi kompetensi yang dibutuhkan / 4 2. Permintaan kegiatan consulting (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi) dari Mitra tidak bisa dipenuhi / 3	182,124,000.00	Ahmad Baihaqi	PP	2	2	2	2	8
10		Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	25.00	7.00	6.00	6.00	6.00	1	Akuntabilitas aset desa	1. SDM yang ada belum memenuhi kompetensi yang dibutuhkan / 4 2. Permintaan kegiatan consulting (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi) dari Mitra tidak bisa dipenuhi / 3	182,124,000.00	Ahmad Baihaqi	PP	1	1	1	-	3
<b>BIDANG AKUNTAN NEGARA</b>																			
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target	Proyek Strategis Nasional (PSN)	1.00				1.00	1	Pengawasan Proyek Strategis Nasional	Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penugasan Assurance (Audit, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan)	39,524,000.00	Tri Iriany W	PP	2	2	2	2	8
2		Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi	Kegiatan Prioritas Daerah	1.00		1.00			2	Pengawasan Program Kegiatan Prioritas Daerah	Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penugasan Assurance (Audit, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan)	56,908,000.00	Tri Iriany W	PP	1	2	-	1	4
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	2.00		2.00			3	Evaluasi Kinerja BUMD	Hasil pengawasan tidak digunakan oleh <i>stakeholder</i>	43,095,776.00	Tri Iriany W	PP	6	10	-	-	16
4		Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	2.00		2.00			4	Evaluasi Kinerja BLUD	Hasil pengawasan tidak digunakan oleh <i>stakeholder</i>	5,386,972.00	Tri Iriany W	PP	-	2	-	-	2
5		Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	60.00			60.00		5	Bimtek penyusunan laporan keuangan	Hasil Kegiatan <i>Consulting</i> (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi) tidak diimplementasikan oleh mitra kerja ( <i>stakeholder</i> )	10,773,944.00	Tri Iriany W	PP	-	-	4	-	4



No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2023	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)	ANGGARAN	PIC	SATUAN	TW1	TW2	TW3	TW4	Jumlah
					TW1	TW2	TW3	TW4											
6		Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa	BUMDes	5.00			5		6	Evaluasi Peran BUMDes dalam Pengembangan Potensi Desa	Ketidakstabilan keuangan BUM Desa (defisit anggaran, kurangnya sumber pendapatan yang berkelanjutan, kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan).	5,386,972.00	Tri Iriany W	PP	-	-	2	-	2
7	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	Jumlah BUMD dengan MRI >= Level 3	BUMD	1.00				1.00	7	Pengawasan atas manajemen risiko badan usaha dan badan layanan	Hasil Kegiatan <i>Consulting</i> (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi) tidak diimplementasikan oleh mitra kerja ( <i>stakeholder</i> )	9,146,666.00	Tri Iriany W	PP	-	-	1	1	2
8		Jumlah BLU/D dengan MRI >= Level 3	BLU/D	16.00				16.00	8	Pengawasan atas manajemen risiko badan usaha dan badan layanan	BLUD belum memahami kemanfaatan MR	146,346,656.00	Tri Iriany W	PP	-	-	16	16	32
9		Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI >= Level 3	BLU/D	2.00				2.00	9	Pengawasan atas manajemen risiko badan usaha dan badan layanan	-Ketidakpatuhan BLU terhadap kebijakan dan prosedur, -Belum menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan dan regulasi	18,293,332.00	Tri Iriany W	PP	-	-	2	2	4
<b>BIDANG INVESTIGASI</b>																			
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Rupiah (Juta)	1,649.00			1,649.00		1	Optimalisasi Penerimaan Negara	Tim audit gagal dalam mendapatkan bukti (cukup, kompeten dan relevan) dan menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara	115,000,000.00	Ambal Riyanto	PP	-	-	1	-	1
2		Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah	Rupiah (Juta)	56,684.00		18833.33	18833.33	18833.33	1	Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah	Tim audit gagal dalam mendapatkan bukti (cukup, kompeten dan relevan) dan menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara	25,000,000.00	Ambal Riyanto	PP	-	1	1	-	2
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	(%) Persen	85.00				85.00	1	Pengendalian Kecurangan dan Hambatan Kelancaran Pembangunan	Tim audit gagal dalam mendapatkan bukti (cukup, kompeten dan relevan) dan menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara	2,824,615.00	Ambal Riyanto	PP	-	-	1	-	1
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	(%) Persen	100.00				100.00	1	Pengendalian Kecurangan dan Hambatan Kelancaran Pembangunan	Tim audit gagal dalam mendapatkan bukti (cukup, kompeten dan relevan) dan menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara	2,824,615.00	Ambal Riyanto	PP	-	-	1	-	1
5		Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	(%) Persen	85.00				85.00	1	Akuntabilitas Pengadaan Logistik dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Pengawasan atas P3DN	Fraud Control Plan (FCP) sudah diterapkan tetapi gagal mendeteksi kecurangan	5,649,230.00	Ambal Riyanto	PP	1	1	-	-	1
6		Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Pemda	3.00				3.00	1	Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu	SDM yang ada belum memenuhi kompetensi yang dibutuhkan	40,000,000.00	Ambal Riyanto	PP	-	1	-	-	1
7		Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Badan Usaha	1.00				1.00	1	Tata Kelola Pupuk Nasional	SDM yang ada belum memenuhi kompetensi yang dibutuhkan	2,824,615.00	Ambal Riyanto	PP	-	-	1	-	1
<b>BIDANG P3A</b>																			
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP >= Level 3	Provinsi	1.00				1.00	1	Kapabilitas APIP - Pemerintah Daerah	Hasil Kegiatan <i>Consulting</i> (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi) tidak diimplementasikan oleh mitra kerja ( <i>stakeholder</i> )	33,660,000.00	Angka Subaran	PP	-	-	-	1	1

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2023	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)	ANGGARAN	PIC	SATUAN	TW1	TW2	TW3	TW4	Jumlah
					TW1	TW2	TW3	TW4											
2		Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP >= Level 3	Kabupaten/ Kota	15.00				15.00	1	Kapabilitas APIP - Pemerintah Daerah dan Peningkatan Kualitas Pengelolaan JFA	Hasil Kegiatan Consulting (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi) tidak diimplementasikan oleh mitra kerja (stakeholder)	33,660,000.00	Angka Subaran	PP	-	-	-	1	1
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Unit Kerja	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	82.00				82.00	1	Self Assessment SAKIP Unit Kerja Mandiri Eselon 2	Menurunnya nilai SAKIP	0.00	Angka Subaran	Skor Unit Kerja	-	-	-	-	1
4		Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	(%) Persen	100.00				100.00	1	Pemantauan RTP melalui aplikasi	Rancangan Pengendalian Tidak Dilaksanakan	0.00	Angka Subaran	Dokumen	1	1	1	1	4
<b>BAGIAN TATA USAHA</b>																			
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Unit Kerja	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75.00				75.00	1	Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Pegawai belum memahami pentingnya membangun zona integritas	20,370,000.00	Zulkifli	Skor Unit kerja	-	-	-	1	1
2		Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)	(%) Persen	70.00				70.00	1	Penugasan pegawai mengikuti diklat	Pegawai belum sepenuhnya menyerap materi yang diterima	23,904,000.00	Zulkifli	Dokumen	-	-	-	1	1
3		Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	75.00				75.00	1	Pengukuran Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Menurunnya Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	0.00	Zulkifli	Dokumen	-	-	-	1	1
4		Skor IKPA Unit Kerja	Indeks Skala 100	95.00				95.00	1	Penyusunan Dan Revisi RKA	Perencanaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan	40,000,000.00	Zulkifli	Skor Unit kerja	1	1	1	1	4
5		Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks Skala 100	80.00				80.00	1	Pemeliharaan BMN di unit kerja	Pemeliharaan BMN belum sesuai dengan aturan yang berlaku	71,370,000.00	Zulkifli	Laporan	-	-	-	1	1

Bandar Lampung, Februari 2023

Kepala Penyidikan

Suyarsih Fifi Herwati

NIP 19610713 198402 2 001